

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan ekonomi merupakan salah satu konsep penting yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad,2004). Berdasarkan definisi tentang pembangunan di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sangat erat hubungannya dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Arsyad (2004) adanya keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan teori Todaro ditunjukkan oleh tiga hal pokok, yang pertama yaitu dilihat dari perkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kedua dilihat dari meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan yang ketiga dapat dilihat dari peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila dalam prosesnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga nantinya kegiatan tersebut mampu mendorong meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang berguna dalam memenuhi kebutuhan pokok harian mereka.

Di Indonesia adanya pembangunan ekonomi sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Menurut Sukirno (1997) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum sedangkan menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.1
Kondisi Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
DKI Jakarta	3,75	3,70	3,72	4,09	3,61	3, 77
Jawa Barat	10,65	9,89	9,61	9,18	9,57	9, 78
Jawa Tengah	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	14, 44
DI Yogyakarta	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	14, 94
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	12, 84
Banten	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	5,83
Nasional	12,36	11,66	11,46	10,96	11,13	11, 51

Sumber : BPS RI, Susenas Maret 2015

Tingkat kemiskinan Nasional mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2011 tingkat kemiskinan Nasional mencapai angka 12,36% selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,66%, sedangkan pada dua tahun berikutnya menjadi 11,46 % pada tahun 2013, dan menjadi 10, 96% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 mengalami

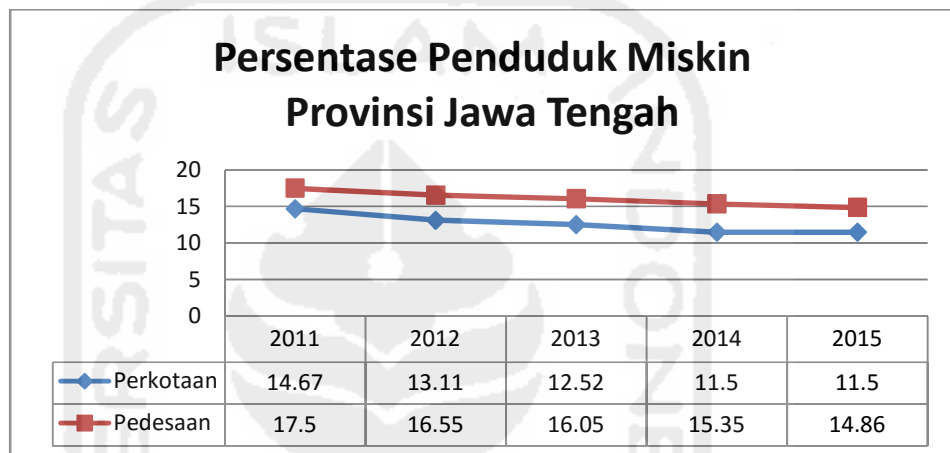
kenaikan lagi menjadi 11,22 %. Berdasarkan data kemiskinan di pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi rata-rata kemiskinan kedua tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta yaitu dengan rata-rata sebesar 14,44 % selama lima tahun terakhir sedangkan untuk urutan ketiga berada pada Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 12,84 %, dan urutan selanjutnya berada pada Provinsi Jawa Barat sebesar 9,78 % dan DKI Jakarta mempunyai rata-rata tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 3,77%

Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren menurun walaupun berfluktuasi dan tidak terlalu signifikan pada perkembangannya, adanya penurunan tingkat kemiskinan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2015), persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 15,76% dan pada tahun 2012 sebesar 14,98% . Pada tahun 2013 hingga 2014 masing-masing sebesar 14,44%, 13,58%, dan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 13,58 %. Meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah kemiskinan, namun persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi di banding persentase kemiskinan nasional, sehingga diperlukan usaha keras dari pemerintah dalam penetapan kebijakan berkenaan untuk menekan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Pada negara berkembang khususnya di Indonesia, kemiskinan memiliki penyebaran yang tidak seimbang baik antar negara maupun wilayah. Di Indonesia kemiskinan paling besar terletak di daerah pinggiran yang letaknya jauh dari

pemerintah pusat yang bertindak sebagai pengatur pembangunan, akibatnya daerah pinggiran kurang mendapat perhatian secara maksimal. Masalah kemiskinan yang terjadi akibat tidak meratanya pembangunan dapat mengakibatkan masalah yang serius jika tidak segera diatasi oleh pemerintah.

Gambar 1.1



Sumber : BPS, Data Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2015

Berdasarkan data kemiskinan BPS (2015), Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan maupun perkotaan menunjukkan angka penurunan. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah paling besar didominasi di daerah pedesaan. Pada tahun 2011 kemiskinan di kota sebesar 14,67 % lebih kecil sedangkan untuk daerah pedesaan menunjukkan angka yang lebih besar yaitu sebesar 17,50 % dan pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan yaitu menjadi 11,5 % untuk daerah perkotaan dan 14,86% untuk daerah pedesaan. Masalah kemiskinan

di daerah pedesaan yang menunjukkan angka lebih besar dari kemiskinan yang terjadi di daerah perkotaan, disebabkan oleh kurangnya akses serta minimnya infrastruktur di daerah pedesaan yang menyebabkan kegiatan perekonomian di wilayah pedesaan menjadi tertinggal dan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Tabel 1.2

UMP Provinsi Jawa Tengah

Tahun	UMP
2011	Rp. 675.000
2012	Rp. 765.000
2013	Rp. 830.000
2014	Rp. 910.000
2015	Rp. 910.000

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah masalah pengupahan. Adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan salah satunya karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia

sering dikaitkan dengan kemampuan serta ketrampilan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun.

Tingkat upah minimum Provinsi dijadikan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum Kabupaten yang belum bisa menetapkan upah minimum daerahnya. Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) . Pada tahun 2011, Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 675.000 dan pada tahun berikutnya naik sebesar Rp. 765.000. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar Rp. 830.000 dan Rp. 910.000 pada tahun 2014, walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum ini tetap saja jumlahnya harus di atas kebutuhan hidup layak masyarakat, ini artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah upah minimum.

Tabel 1.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah

Tahun	TPT (%)
2011	7,07
2012	5,61
2013	6,01
2014	5,68
2015	4,99

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain tingkat pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik mendefinisikan arti pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertamakali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan pengangguran jangka pendek yang diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan yang digunakan sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru , untuk itu dalam perkembangannya tingkat pengangguran terbuka dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain angka kemiskinan.

Kaitannya dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin adalah bahwa adanya pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak dapat menerima pendapatan yang nantinya akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka, dimana semakin besar pengangguran maka akan mempengaruhi peningkatan penduduk miskin. Di Jawa Tengah pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07 %. dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 5,61% . Pada tahun 2013 kembali naik sebesar 5,61% dan pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,68 %, 4,99%. Walaupun mengalami penurunan pada dua tahun terakhir namun adanya pengangguran harus segera diatasi oleh pemerintah sebelum bertambah serius dan akan berakibat pada peningkatan jumlah kemiskinan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan sumber daya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat. Adanya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses pembangunan ekonomi.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Pertambahan Penduduk/Tahun (Jiwa)
2011	32, 725	0,87
2012	32, 998	0,84
2013	33,264	0,81
2014	33,522	0,78
2015	33,774	0,75

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam menekan jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Tahun 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281.492 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2012 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 273.314 jiwa, terus menyusut sampai dengan tahun 2015 hanya bertambah 251.478 jiwa. Walaupun menunjukkan angka penurunan dalam penambahan jumlah penduduk, pemerintah tetap harus memberikan upaya terhadap penekanan dalam peningkatan jumlah penduduk agar kedepannya masalah penduduk tersebut tidak akan berdampak pada adanya peningkatan penduduk miskin.

Terkait masalah kemiskinan, kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meminimalkan tingkat kemiskinan. Melalui pendidikan diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap penurunan

tingkat kemiskinan, ini dikarenakan kualitas pendidikan dapat memperluas kesempatan kerja masyarakat yang nantinya dapat memberikan dampak berupa peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian.

Tabel 1.5

Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Angka Melek Huruf
2011	90,34
2012	90,45
2013	91,71
2014	92,98
2015	93,12

Sumber : BPS, Susenas

Kualitas pendidikan suatu wilayah dapat dinilai dari seberapa besar masyarakat yang melek huruf. Semakin besar angka melek huruf di masyarakat suatu wilayah menunjukkan keberhasilan dalam upaya pemerintah terhadap peningkatan pendidikan di wilayah tersebut. Dari data angka melek huruf Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 90,34% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 90,45 % . Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2015 yaitu sebesar 93,12%. Dengan adanya peningkatan angka melek huruf ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, untuk mengetahui sejauh mana masing-masing faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat Angka Melek Huruf (AMH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh Angka Melek Huruf (AMH) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
5. Menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi Instansi Terkait
Penulis mengadakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan memberikan tambahan wawasan bagi pihak- pihak terkait

dengan permasalahan ekonomi berkenaan dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam setiap karya tulis, sistematika yang baik dan benar sangat dibutuhkan guna kesempurnaan tulisan tersebut. Penulisan skripsi ini sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan obyek penelitian, rumusan masalah serta manfaat dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Selain itu di dalam bab ini juga berisi tentang sistematika penulisan .

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan serta berisi landasan teori yang akan digunakan dalam mendukung penelitiannya. Selain itu juga berisi kerangka pemikiran atau alur penelitian dan hipotesis penelitian

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan tentang berbagai variable yang digunakan dalam penelitian, serta berisi tentang suatu pembahasan mengenai

model analisis penelitian dan jenis-jenis data beserta sumber data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. HASIL DAN ANALISA

Dalam bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistic.

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab yang terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi ini muncul sebagai hasil simpulan. Selain itu juga berisi saran serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait apabila ditemukan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penelitian

